SIKAP PEMILIH TERHADAP PASANGAN CALON KEPALA DAERAH MENJELANG PILKADA LANGSUNG DI KOTA BITUNG

Oleh:
Johny Lumolos

Abstract

The purpose of General Election including in Local Government (Pemerintah Daerah) is to create a democratic government based on the principle of the people, by the people and for the people. In so doing, the process of General Election must be colored by transparency and accountability principle. In line with this notion, this research portray empirical condition surrounding Local Government General Election (Pemilihan Kepala Daerah) in Bitung Municipality in year 2004. As an explorative study, this research utilizes survey technique to draw respondents' opinion which will be presented in a descriptive analysis method. This research aims to analyze attitudes of the voters in determining their preferences, the reason of their decision, and the influence of money politics on the voters' decision. This research confirms that most of the voters choose the candidates based on three main reasons as: they know the candidates very well, they believe in the candidates' personal character (figur) and they have an ideological bond with the candidate. However, the effect of ideology is only apparent among PDI-P voters as they consistently choose candidates from PDI-P, while others voters are likely to choose the candidates based on the figur. On the contrary with the common perception about effect of money politics, this research indicates that in this case, money politics is less effective in influencing the voters' decision to choose the candidates.

Pendahuluan

Untuk menyelenggarakan sebuah proses pemilihan kepala daerah (wali kota dan wakil wali kota) secara langsung, jujur dan adil, diperlukan komitmen semua *stakeholders* untuk menyelenggarakan pemilihan secara transparan, akuntabel, dan menghindari praktik politik uang. Komitmen itu harus dapat ditunjukan oleh semua *stakeholder* yang terkait, seperti penyelenggara pemilu, sepeti KPUD dan jajarannya, Panwaslu berserta jajarannya, partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon itu sendiri dan tim suksesnya (tim kampanye), organisasi pemantau pemilu dan lembaga-lembaga pengamat, serta dukungan masyarakat pemilih.

Hal ini sangat penting agar hasil yang diperoleh memiliki tingkat akseptabilitas dan legitimasi yang tinggi yang pada gilirannya dapat memperoleh dukungan dari lembaga legislatif (DPRD) guna penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien. Artinya pemerintah terpilih memperoleh dukungan penuh, baik dari rakyat maupun lembaga legislatif sehingga program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara baik dan mencapai sasaran pelayanan publik yang prima.

Namun berdasarkan hasil *pre-survey* (pengamatan awal) menunjukkan bahwa jauh sebelum pelaksanaan dan dalam proses kampanye politik dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Bitung telah mengemuka isu curi *start* dan praktik politik uang serta berbagai jenis pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan selain mengidentifikasi sikap masyarakat pemilih terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, juga menguji apakah ada praktik politik uang dan sejauh mana pengaruhnya terhadap perubahan sikap pemilih dalam menentukan pasangan calon wali kota dan wakil walikota yang sedang berkompetisi. Dalam konteks inilah penelitian ini urgen untuk dilakukan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi

pengembangan ilmu politik, khususnya perilaku politik, dan secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi *stakeholders* untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah secara langsung guna memperoleh hasil yang *legitimate* di masa yang akan datang, sekaligus menjadi bahan masukan bagi partai politik dalam menata kembali sistem rekruitmen pejabat publik.

Pada tahun 2005 ini, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh rakyat secara langsung. Suatu perubahan sistem politik yang memang sejalan dengan prinsip demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini telah menjadi amanat pasal 24 ayat (5) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 yang menyatakan "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .... dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan".

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum? Menurut sumber dari pejabat KPU Pusat, ada dua. Pertama, agar lebih konsisten dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial antara lain ditandai oleh pemilihan secara langsung oleh rakyat. Karena itu sebagaimana pada tingkat nasional, presiden sebagai kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka kepala daerah untuk daerah otonom juga dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kedua, untuk menciptakan pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek antara DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah. Salah satu ciri pemerintahan yang menganut pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek adalah baik lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Keduanya mempunyai kekuasaan yang seimbang dengan tugas dan kewenangan yang berbeda, keduanya saling mengontrol melalui pembuatan peraturan daerah dan APBD, dan keduanya memiliki legitimasi dari rakyat.[1]

[1] www.kpu.or.id, diakses pada tanggal 28 November 2006.

Untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung diperlukan perangkat perundang-undngan yang mengatur tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tahapan pelaksanaan pilkada, lembaga-lembaga pelaksana, pengawas, dan pemantau. Dalam kaitan ini perangkat perundang-undangan yang mengaturnya proses penyelenggaraan pilkada langsung tersebut dikeluarkan oleh KPU dan KPUD setempat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UUD 1945 (yang telah diamandemen) dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti UU No. 22 Tahun 1999, UU Tentang Pemilihan Umum, UU Kepartaian dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan produk UU tersebut, maka proses penyelenggaraan pilkada langsung, khususnya di lokasi penelitian, terdiri dari proses mendapatkan dukungan dari partai atau gabungan partai politik, proses seleksi administratif dan politis di internal partai atau gabungan partai, proses seleksi administratif di KPUD untuk penetapan calon kepala daerah sebagai peserta (nominator) pilkada langsung, proses pembentukan tim sukses, proses menggalang massa (simpatisan dan non-simpatisan), proses kampanye, dan terakhir proses pencobloson surat suara dan perhitungan suara, agar para pasangan calon kepala daerah ini bisa terpilih atau terpilih kembali.

Kerangka Teoritis

Dalam semua proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut setidaknya menyangkut perilaku yang akan diperankan oleh semua *stakeholders*, terutama adalah pasangan calon kepala daerah, partai politik, dan masyarakat pemilih. Ketiga komponen ini tentunya saling berinteraksi antara satu dengan lainnya yang akan melahirkan sebuah *output* berupa terpilihnya pasangan calon kepala daerah menjadi kepala daerah, yang dalam kasus ini adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung untuk periode 2005—2010.

Interaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik di satu sisi dan antara masyarakat pemilih dengan pasangan calon kepala daerah di sisi yang lain akan melahirkan sikap tertentu. Artinya bahwa bagaimana pasangan calon menyikapi kondisi

persaingan sehingga dapat lolos untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang definitif dan bagaimana masyarakat menyikapi pasangan calon untuk menetapkan pilihannya, sering ditandai dengan aktivitas penyela yang disebut dengan istilah "politik uang".

Amzulian Rifai (2003) mengartikan politik uang (*money politics*) sebagai tindakan memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD agar memberikan suaranya kepada calon kepala daerah yang memberikan bayaran tersebut. Kaitannya dengan pilkada langsung oleh rakyat, maka konteks politik uang diartikan secara umum sebagai kebijaksanaan dan/atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon kepala daerah yang memberikan bantuan atau bayaran tersebut.

Mengenai betul tidaknya tindakan politik uang itu, menurut Amzulian Rifai (2003) terdapat dua paham yang berbeda. Pertama, kelompok yang merasa yakin bahwa politik uang ini benar-benar ada. Kedua, kelompok yang memandang politik uang sebagai isu murahan yang sering kali dihembuskan oleh pihak yang kalah atau tidak puas dengan hasil suatu proses pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, praktik politik uang dimaksudkan untuk mengubah sikap, baik partai politik yang memiliki kewenangan mencalonkan pasangan calon kepala daerah, maupun masyarakat pemilih yang nanti memberikan suaranya pada pasangan calon yang melakukan praktik politik uang tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan sikap dan perubahan sikap itu sendiri.

Sikap merupakan suatu unsur yang sangat tergantung pada berbagai kondisi serta situasi dan kondisi saat individu itu harus mengekspresikan sikapnya. Asumsi tersebut ditegaskan kembali oleh Koentjaraningrat, (1984) dengan mengatakan bahwa sikap ialah kecondongan yang berasal dari dalam diri individu untuk berkelakuan dengan suatu pola tindakan tertentu terhadap suatu objek yang menimbulkan perasaan ataupun pendiriannya terhadap objek tersebut.

Menurut Mueller (1992) bahwa sikap sebagai jumlah keseluruhan kecenderungan dan perasaan, kecurigaan dan prasangka, pra-pemahaman yang mendetail, ide-ide rasa takut, ancaman dan keyakinan tentang sesuatu hal. Sementara itu, Alport (dalam Rakhmat, 1994) menyebutkan bahwa sikap merupakan kesiapan saraf sebelum memberikan respons.

Azwar (1997) berpendapat bahwa sikap merupakan mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku kita terhadap manusia atau sesuatu yang kita hadapi, bahkan terhadap diri kita sendiri.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap merupakan unsur psikologis dari seseorang yang dinyatakan melalui opini, keyakinan, perasaan, pernyataan fakta, dan pernyataan tentang perilakunya sendiri. Apabila seorang individu berada pada suatu situasi yang bebas dan tidak terikat pada berbagai bentuk tekanan atau hambatan, lalu diajak untuk merespons sesuatu objek, maka ia akan menunjukkan atau menampakan sikapnya lugas sesuai ekspresi kata hatinya. Jadi sikap merupakan respons individu terhadap suatu objek. Respons yang diberikan tentunya dapat menerima atau menolak, dapat positif ataupun negatif terhadap objek tersebut. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa sikap adalah menyukai atau menolak suatu objek psikologis.

Pada bagian lain, Gerungan (1996) berpendapat bahwa sikap dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sikap sosial dan sikap individual. Sikap sosial dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Jadi sikap sosial dinyatakan tidak hanya oleh seorang saja, tetapi juga oleh orang-orang lain yang sekelompok atau masyarakat. Sikap individual dimiliki oleh seorang demi seorang saja dan berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial.

Untuk dapat membedakan antara sikap dengan faktor-faktor psikologi lainnya, yang turut mempengaruhi tingkah laku manusia, maka perlu dikemukakan tentang ciri-ciri sikap. Menurut Gerungan (1996) bahwa ciri-ciri sikap adalah sebagai berikut: (1) Sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya, (2) Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang, (3) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek, (4) Objek sikap dapat merupakan

suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari sederetan objek, (5) Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi perasaan.

Selanjutnya Effendi (1988), mengemukakan ada enam ciri sikap, yaitu (1) Faktor sikap bukan pembawaan sejak lahir, melainkan terbentuk selama perkembangannya sebagai akibat hubungannya dengan objek-objek di lingkungannya; (2) Sikap dapat berubah sebagai hasil interaksi antara seseorang dengan orang lain; (3) Sikap tidak berdiri sendiri, melainkan senantiasa mengandung relasi dengan suatu objek. Objek itu tidak hanya satu jenis, melainkan bermacam-macam sesuai dengan banyaknya objek yang menjadi perhatian orang yang bersangkutan; (4) Sikap berkaitan dengan dimensi waktu, yang berarti sikap hanya cocok untuk situasi pada waktu tertentu, yang belum tentu sesuai dengan waktu lain. Karena itu sikap dapat berubah menurut situasi; (5) Sikap tidak menghilang walaupun kebutuhan sudah terpenuhi; (6) Sikap mengandung faktor-faktor motivasi dan emosi.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sikap dapat digambarkan sebagai suatu pandangan, tetapi dalam hal ini masih berbeda dengan suatu pengetahuan yang dimiliki seseorang. Pengetahuan mengenai suatu objek tidak sama dengan sikap terhadap objek itu. Pengetahuan mengenai suatu objek baru menjadi sikap terhadap suatu objek apabila pengetahuan itu disertai dengan kesiapan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan terhadap objek itu sendiri. Artinya, seseorang pemilih dapat menentukan sikapnya terhadap pasangan calon tertentu manakala ia memiliki pengetahuan atau minimal mengenal pasangan calon tersebut.

Sikap ini muncul karena didorong oleh citra (*image*) yaitu suatu gambaran atau ide yang terbetik dalam mental individu. Citra bisa bersifat positif ataupun negatif dan tercipta sebelum terjadinya kontak dengan suatu objek.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan faktor penentu perilaku seseorang, karena sikap berhubungan dengan persepsi, kepribadian, dan motivasi. Sikap itu sendiri merupakan kesiapsiagaan mental yang dipelajari dan diorganisir melalui pengalaman, dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, objek dan situasi yang berhubungan dengannya. Kepribadian ialah seperangkat karakteristik yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan, dan lingkungan. Perangkat variabel ini menentukan persamaan dan/atau perbedaan perilaku individu.

Kaitannya dengan sikap pemilih dalam menentukan pilihan terhadap pasangan calon kepala daerah (wali kota dan wakil wali kota), maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa penentuan sikap tersebut sangat tergantung pada tiga hal pokok, yaitu persepsi, keperibadian, dan motivasi. Persepsi merupakan aktivitas pikiran seseorang secara aktif dalam memberikan tanggapan, pandangan atau respons terhadap suatu objek atau stimulus. Perbedaan-perbedaan latar belakang pengetahuan, kondisi psikologis, pengaruh lain kelompok dan sebagainya akan membedakan pandangan-pandangan tertentu dalam menentukan sikap dan tindakan seseorang. Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa persepsi seseorang yang berbeda terhadap suatu objek antara satu dengan yang lain dimungkinkan oleh adanya perbedaan-perbedaan kognitif yang lebih bersifat subjektif. Materi kampanye, termasuk penggunaan uang dalam kampanye untuk menarik simpatik pemilih akam membentuk persepsi sesorang terhadap pasangan calon yang melakukan kampanye tersebut, namun belum tentu dapat mempengruhi perubahan sikap dalam menentukan pilihan terhadap pasangan calon yang dimaksud apabila persepsi telah terbentuk jauh sebelum adanya penyampaian kampanye walaupun dengan menggunakan politik uang.

Sejalan dengan asumsi di atas, dapat dikatakan bahwa perbedaan-perbedaan persepsi tersebut dipengaruhi oleh seperangkat kognisi yang oleh Festinger dalam Sarwono (1984) dimaksudkan sebagai hal-hal yang diketahui oleh seseorang tentang dirinya sendiri, perilakunya dan tentang keadaan di sekitarnya. Hal ini dimaksudkan adalah berupa pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya sebagai kerangka berpikir dalam merespons rangsangan dari luar, sedangkan seperangkat kognisi yang diperoleh oleh seseorang tidaklah sama, karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi seseorang terhadap suatu objek.

Sementara itu, kepribadian dimaksudkan adalah seperangkat karakteristik yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor-faktor sosial,

kebudayaan, dan lingkungan. Sedangkan motivasi sebagai salah satu komponen pembentuk sikap, selain aspek persepsi dan keperibadian adalah rangsangan atau dorongan nyata yang muncul, baik dari dalam diri individu maupun dirangsang dari luar diri individu. Motivasi itu sendiri, menurut Manulang (1983) adalah sebagai pemberian motif, penimbunan motif atau hal yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat pula diartikan sebagai faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Stoner dan Wankel (1989) mengartikan motivasi sebagai hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia.

Westerman dan Donoghue (1992) menyatakan bahwa motivasi dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang memberi semangat bagi perilaku seseorang dan mengarahkannya kepada pencapaian beberapa tujuan atau secara lebih singkat yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang harus dikerjakan secara sukarela dan dengan baik.

Mengacu pada beberapa pendapat dan teori-teori yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa persepsi, kepribadian, dan motivasi bisa saja berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku pemilih, namun hal tersebut tergantung dari sejauh mana intensitas ketiga faktor tersebut dapat berpengaruh pada perubahan sikap seseorang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dan teknik survai. Konsep/ variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari, Pertama, sikap pemilih dalam menentukan pilihan terhadap pasangan calon kepala daerah yang secara operasional diartikan sebagai kecenderungan untuk menetapkan pilihan terhadap salah satu dari beberapa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung partai politik tertentu kemudian disetujui oleh KPUD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, variabel ini diukur dari sikap responden untuk menentukan pilihan atau tidak menentukan pilihan (abstain) atau ragu-ragu. Kedua, alasan-alasan yang digunakan pemilih dalam menentukan sikap memilih pasangan calon kepala daerah yang secara operasional didefinisikan sebagai hal-hal yang menjadi motif atau alasan atau dorongan atau harapan responden dalam menentukan pilihan terhadap salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang dianggap memenuhi kriteria menurut responden.

Operasionalisasi variabel di atas kemudian dirumuskan dalam sejumlah indikator yang nantinya dikemukakan dalam *questioner* yang menjadi alat utama survei dalam penelitian ini. Indikator-indikator tersebut meliputi faktor-faktor fisik dan psikologis kandidat wali kota dan wakil wali kota, selain juga faktor-faktor popularitas dan kesiapan program yang nantinya diusung dalam kampanye pilkada. Variabel ini diukur dari beberapa indikator alasan, antara lain:

a. Yang baru, dan dapat membawa perubahan
b. Cakap
c. Ganteng
d. Usia muda
e. Banyak uang
f. *Low profile*
g. Sudah berbuat banyak untuk rakyat
h. Pengalaman dalam pemerintahan
i. Prioritas program sesuai kebutuhn rakyat
j. Bermoral tinggi/perilaku yang baik
k. Penguasa
l. Pengusaha
m. Pimpinan Partai
n. Tidak terlibat masalah (KKN)
o. Tidak membeda-bedakan
p. Komitmen dan keberpihakan kepada rakyat
q. Alasan-alasan lain:. 1.....
2.....
3.....

Ketiga, praktik politik uang untuk mempengaruhi perubahan sikap pemilih dalam menentukan pilihan terhadap pasangan calon kepala daerah yang didefinisikan secara operasional sebagai ada-tidaknya perubahan sikap dalam memilih setelah responden menentukan pilihannya sebagai akibat dari praktik politik uang. Dengan demikian, variabel ini dapat diamati dari: (a) adanya pengaruh praktik politik uang terhadap perubahan sikap memilih pasangan calon lain; (b) ragu-ragu/tidak tahu; (c) tidak ada perubahan sikap memilih.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Kota Bitung yang telah memiliki hak pilih berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data KPUD Kota Bitung, tercatat ± 125.482 pemilih dengan 281 TPS yang tersebar di lima kecamatan.

Penarikan sampel dilakukan dengan teknik acak proporsional (*proportional random sampling*), agar anggota sampel yang diambil dapat mewakili secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di setiap kecamatan (wilayah pemilihan). Adapun ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Yamane (dalam Rakhmat, 1991) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd2 + 1}$$

Dengan menggunakan presisi 0,04 (4%) dan besar populasi adalah 125.482 orang pemilih, maka diperoleh sampel responden sebanyak 218 orang pemilih. Selanjutnya, untuk mendapatkan ukuran sampel secara proporsional dari setiap unit sampling (kecamatan), digunakan rumus sebagai berikut:

$$n_i = \frac{nNi}{N}$$

Adapun ukuran atau besar masing-masing unit sampel (sub sampel) dapat dilihat pada Tabel 1.

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Untuk menjaring data primer digunakan kuesioner. Selain itu, *interview guide* (pedoman wawancara) digunakan untuk melengkapi data primer. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi dan semua data dikumpulkan melalui teknik survei dan observasi langsung.

Semua opsi yang dipilih oleh responden ditabulasi dengan menggunakan piranti komputer dengan memanfaatkan fasilitas Program Excel. Nomor, lokasi, dan jawaban responden ditempatkan pada baris (*raw*), sementara nomor responden, intisari jawaban dan opsinya ditempatkan pada kolom (*columns*). Perpotongan antara baris dan kolom merupakan himpunan jawaban dari setiap responden yang diwakili oleh sebuah kuesioner.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tabel (tabel frekuensi), baik frekuensi absolut (f) maupun frekuensi relatif atau persentase (%) yang diolah melalui tabel frekuensi, di mana setiap butir pertanyaan dianalisis berdasarkan kecenderungan jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan. Selain itu, untuk mempermudah pemahaman pembaca, maka hasil tabulasi melalui teknik di atas, divisualisasikan ke dalam bentuk grafik atau gambar.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data

Berdasarkan teknik sampling yang digunakan diperoleh jumlah responden untuk Kota Bitung sebanyak 218 orang pemilih (Tabel 1) yang terdistribusi di lima kecamatan, namun yang terjangkau (kuesioner dikembalikan) sebanyak 208 responden atau 95,4%, dan semuanya memenuhi syarat untuk dianalisis.

Identitas Responden

Dengan menggunakan data tabulasi, ditampilkan identitas responden sebagai berikut.

1) Jenis Kelamin dan Umur

Dari 208 responden yang berhasil terkumpul, terdapat 121 orang pemilih (58,17%) berjenis kelamin laki-laki dengan usia paling banyak (48 orang) di atas 40–60 tahun, sementara sisanya sebanyak 87 orang (41,83%) berjenis kelamin perempuan dengan usia paling banyak (45 orang) adalah 25–40 tahun.

2) Agama

Hasil tabulasi data diketahui bahwa sebagian besar (65,4%) responden beragama Kristen Protestan yang terkonsentrasi di 2 kecamatan, masing-masing Bitung Selatan (31,62%) dan Bitung Timur (25,74%), menyusul Islam sebesar ± 28,8%, yang sebagian besar berdomisili di Kecamatan Bitung Barat (36,67%) dan Bitung Tengah (33,33%), agama Katolik ± 5,3% dan sisanya hanya sebesar 0,5% beragama Budha.

Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Kecamatan Sekota Bitung (n1 = 218)

Kecamatan	Sub Populasi (N_i)	Proporsi	Sub Sampel (n_i)
Bitung Utara	11583	0.09	20
Bitung Barat	29823	0.24	52
Bitung Tengah	33900	0.27	59
Bitung Timur	37967	0.30	66
Bitung Selatan	12209	0.10	21
Jumlah	125482	1.00	218

Sumber: Data Sekretariat KPU Kota Bitung (2005)

3) Pendidikan Formal

Tingkat pendidikan sebagian besar (46,15%) responden adalah SLTA, di mana ± 38% telah tamat dan 7,2% tidak tamat, serta hanya 1% yang belum selesai (sementara menjalani pendidikan); dan yang paling banyak berdomisili di Kecamatan Bitung Timur, yakni sekitar 26 responden atau 27,08%.

4) Pekerjaan

Jenis pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, buruh, supir, nelayan dan pegawai perusahaan merupakan mata pencaharian responden yang terbanyak, masing-masing 22,1%, 17,8%, 17,3% dan 12,5%. Selanjutnya disusul jenis pekerjaan seperti wiraswasta (6,3%), petani (5,3%), pelajar/mahasiswa (5,3%) dan profesi (guru, dokter dan lain-lain) sebesar 4,8%, dan yang paling kecil adalah PNS, yakni hanya sebesar 3,4%.

5) Suku Bangsa/Etnis

Responden didominasi oleh suku/etnis Sanger (Sangihe) sebesar 50% dari jumlah responden yang diwawancarai (208), menyusul suku/etnis Minahasa sebesar 22,1% dan yang paling kecil/sedikit (0,5%) adalah suku Papua. Dari sekitar 50% suku Sanger, paling banyak berdomisili di Kecamatan Bitung Selatan (41,35%), Bitung Tengah (28,85%), dan Bitung Timur (21,15%).

6) Keterlibatan dalam Partai Politik

Sebagian besar (86,1%) responden terlibat/ berperan serta dalam partai politik, baik sebagai pengurus, anggota maupun sebagai simpatisan dan sisanya 16,9% non-partisan. Dari sekitar 12 partai politik yang teridentifikasi, ternyata paling banyak (36,5%) responden yang terlibat sebagai anggota PDIP, sebagian besar (61,84%) sebagai simpatisan dan kebanyakan berdomisi di Kecamatan Bitung Tengah. Partai Golkar menyusul yakni sebesar 18,3%, yang terdiri simpatisan (55,3%), anggota (23,7%) dan pengurus (21,1%).

Partai politik yang terbesar berikutnya adalah PKPI, yang sebesar 16,3% dari jumlah responden, ternyata mempunyai proporsi yang hampir sama (rata-rata) baik sebagai pengurus, anggota maupun sebagai simpatisan. Sementara itu, partai politik paling kecil terdiri dari PPP, PNI, PKS dan Partai Buruh (PB), masing-masing 0,5%, PBR dan PAN, masing-masing 10%, PDS, Demokrat dan PKB, masing-masing 4,8%, 3,4% dan 2,9%.

Mengacu pada gambaran data tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk Kota Bitung, tampaknya PDIP masih mendominasi (37,5%), menyusul Golkar (22,6%), PKPI (12,98%), PDS (4,81%), Demokrat (3,37%), dan partai gabungan[1] sebesar 8,17%, sementara yang cukup besar proporsinya adalah non-partisan (tidak berpartai) sebesar ± 11,06%. Untuk jelasnya dapat disimak pada gambar berikut ini.

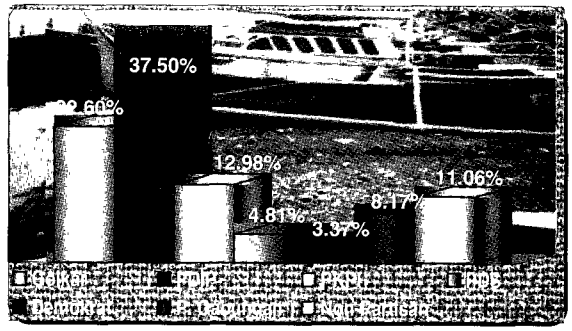

Gambar 1. Persentase Partisipasi Responden dalam Partai di Kota Bitung

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Nomor Urut Calon

Setelah melewati proses seleksi, maka KPUD Kota Bitung menetapkan 5 (lima) pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung yang akan berkompetisi dalam pilkada langsung. Kelima pasangan calon tersebut berikut nomor urut calon dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bitung dan Nomor Urut Calon

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	
	Walikota	Wakil Walikota
1	Dr. (HC) Milton Kansil, SE	Dr Dirk Lengkong
2	Robby Mamahit, MBA	Jhon Gandana
3	Drs. Femmy T. Wurangian,MBA	Hi. Rosman Idris, SE, M.Si
4	Hanny Sondakh, SE, M.Si	Robert Lahindo, Sh, M Si
5	Eduard Tendean, S Sos	Agustifo Tumundo, SE

Sikap Responden terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah

1) Derajat Pengenalan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah

Sebelum menentukan sikap pilihan terhadap salah satu atau lebih pasangan calon kepala daerah (wali kota dan wakil wali kota), maka responden sebagai calon pemilih dalam pemilihan kepala daerah merasa sangat perlu atau penting untuk mengenal terlebih dahulu profil pasangan calon tersebut agar tidak salah/ keliru dalam menetapkan pilihan mereka.

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa 88,9% responden telah mengenal secara baik hampir semua pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung yang nantinya menjadi pilihan mereka, dan hanya 4,8% saja yang secara jujur menyatakan bahwa mereka belum mengenai hampir semua pasangan calon yang ada, kecuali yang sedang berkuasa.

Dari 185 responden yang menyatakan telah mengenal pasangan calon kepala daerah, ternyata sebagian besar atau ± 28,11% berdomisili di Kecamatan Bitung Tengah, menyusul 24,86% Bitung Selatan, 21,1% Bitung Timur, sementara Bitung Barat dan Utara, masing-masing 15,14% dan 10,81%. Dilihat dari jumlah responden tiap kecamatan dan dikaitkan dengan derajat pengenalan responden terhadap pasangan calon, maka dapat dikatakan bahwa hampir semua responden (pemilih) Kecamatan Bitung Tengah mengenal pasangan calon yang akan mereka pilih, menyusul kemudian adalah Bitung Timur (97,5%), Bitung Selatan (97,87%), dan yang kurang berhasil dalam proses sosialisasi pasangan calon adalah Kecamatan Bitung Barat, di mana derajat pengenal responden (pemilih) terhadap pasangan calon kepala daerah hanya mencapai ± 63,64%.

2) Tingkat Keyakinan Responden dalam Menentukan Pilihan

Hasil analisis data (Tabel 3) menunjukkan bahwa sebagian besar responden (80,8%) yang telah mengenal baik pasangan calon kepala daerah merasa yakin bahwa pasangan calon yang bersangkutan akan dipilih pada hari pemungutan suara nanti (pada hari H), sementara ± 12% yang menjawab "tidak tahu" atau ragu-ragu dan hanya 7,2 % yang tidak bersedia menjawab.

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Tingkat Keyakinan terhadap Pasangan Calon Dirinci Per Kecamatan

Kategori	KECAMATAN BITUNG					Jumlah	
	Timur	Barat	Utara	Tengah	Selatan	(f)	(%)
Yakin (a)	38	22	13	49	46	168	80 8
Tidak Tahu (b)	1	16	0	8	0	25	12.0
Tidak yakin (c)	1	6	7	0	1	15	7 2
Jumlah	40	44	20	57	47	208	100.0

3) Urutan Tingkat Kelayakan Pasangan Calon Kepala Daerah

Hasil analisis data secara umum diketahui bahwa tingkat kelayakan lima pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung untuk periode 2005–2010 menurut pendapat responden, di mana dari 208 responden yang diwawancarai, ternyata lebih dari separuh (58%) menjawab tidak tahu (ragu-ragu), 37,7% berpendapat bahwa kelima pasangan calon tersebut layak untuk dipilih menjadi wali kota dan wakil wali kota mendatang, sementara sisanya sebesar ± 4,3% menyatakan bahwa kelima pasangan calon tersebut belum layak untuk dipilih menjadi pemimpin Kota Bitung ke depan.

Gambar 2 menjelaskan tentang proporsi urutan/rangking Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung berdasarkan tingkat kelayakan menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Periode 2005–2010, menurut jawaban responden.

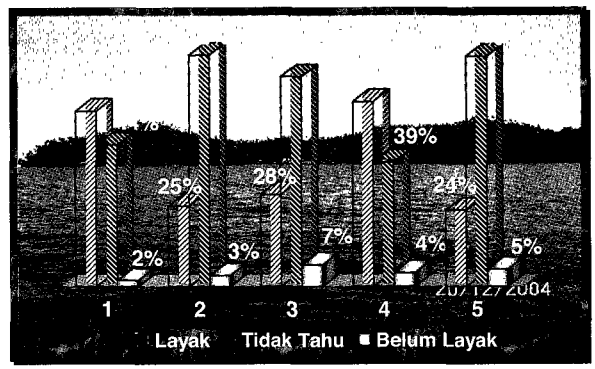

Gambar 2. Posisi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Dilihat dari Tingkat Kelayakan Menurut Pendapat Responden

Dari data tersebut diketahui bahwa pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung nomor urut 4 dan 1 menduduki peringkat paling atas dalam hal tingkat kelayakan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung periode 2005-2010. Kedua pasangan calon tersebut memperoleh penilaian responden masing-masing sebesar 57% untuk pasangan calon nomor urut (NU) 4 dan 54% untuk pasangan

calon NU 1. Sebaliknya, untuk pasangan calon NU 2, 3 dan 5, rata-rata responden menjawab tidak tahu atau ragu-ragu.

4) Penentuan Sikap Responden Dalam Memilih 5 PC Kepala Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi persaingan/kompetesi yang cukup ketat dalam perolehan penentuan sikap pilihan responden antara pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung dengan nomor urut 1, yakni Dr. (HC) Milton Kansil, S.E. dan Dr. Dirk Lengkong mendapatkan 39,4% dengan pasangan calon nomor urut 4, atas nama Hanny Sondakh, S.E., M.Si. dan Robert Lahindo, S.H., M.Si. memperoleh ± 38,9 % pilihan dari 208 responden. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.

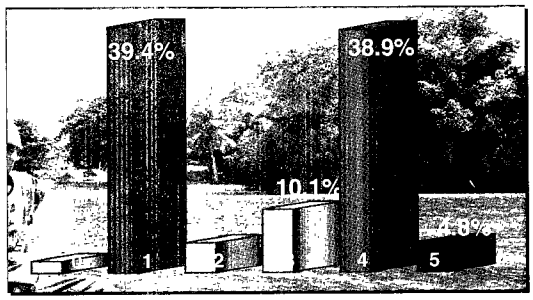

Gambar 3. Persentase Penetapan Pilihan Responden Terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung (Periode 2005 – 2010)

Dari sisi rata-rata prioritas urutan pilihan (1, 2, 3) responden terhadap 5 Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung (Gambar 4) menunjukkan hasil yang sedikit berbeda dengan hanya mengambil prioritas urutan pilihan pertama (pilihan 1), namun tidak mengubah posisi rangking (urutan) pasangan calon sebagaimana tergambar pada Gambar 4.

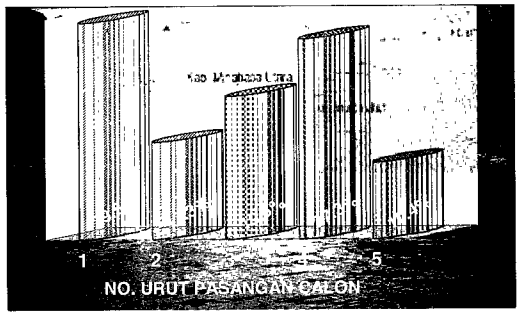

Gambar 4. Rata-Rata Kecenderungan Pilihan Responden (Urutan: 1,2,3) Terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung (Periode 2005 – 2010)

Dilihat dari sisi peta kekuatan basis masa antara pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 4, menunjukkan cukup bervariasi (Gambar 5). Pasangan calon dengan nomor urut 1 memiliki basis massa di wilayah Kecamatan Bitung Tengah dan Selatan, sementara pasangan calon dengan nomor urut 4 mempunyai basis masa berada di wilayah Kecamatan Bitung Timur dan Selatan. Yang menarik adalah kedua pasangan calon memiliki basis massa yang berada di satu kecamatan yang sama, yakni Kecamatan Bitung Selatan, yakni masing-masing sebesar ± 26,8% untuk pasangan calon nomor urut 1, dan 25,9% untuk pasangan calon nomor urut 4.

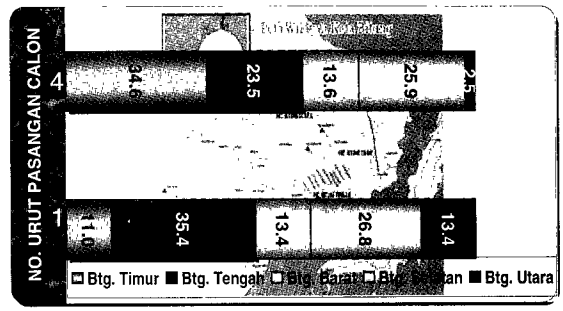

Gambar 5. Persentase Perbedaan Wilayah Basis Masa Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bitung (Periode 2005–2010) antara No. Urut 1 dan 4

Alasan Responden Pemilih Menentukan Sikap dalam Memilih Pasangan Calon

Untuk menentukan sikap terhadap sesuatu objek atau orang lain, sesorang memiliki sejumlah alasan atau faktor-faktor yang menstimulasinya untuk menentukan sikap tersebut. Dari hasil analisis data (Gambar 6), diperoleh informasi bahwa responden (pemilih) dalam menentukan sikap memilih Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung didorong oleh beberapa alasan pokok, antara lain (1) Wali kota dan wakil wali kota terpilih nanti adalah baru dan memampu melakukan perubahan kearah yang lebih baik (±41%); (2) Memiliki komitmen keberpihakan pada rakyat (21%); (3) Telah berbuat banyak bagi kepentingan rakyat (14%); (4) Memiliki pengalaman yang cukup dalam pemerintahan (7%); (5) Mempunyai prioritas program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat (6%); dan (6) Berlaku adil dan tidak diskriminatif. Beberapa alasan tersebut,

tampaknya melekat pada figur yang memperoleh simpati terbesar dari responden yang menetapkan pilihan mereka pada pasangn calon nomor urut 1 dan 4 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya berdasarkan hasil penelitian ini.

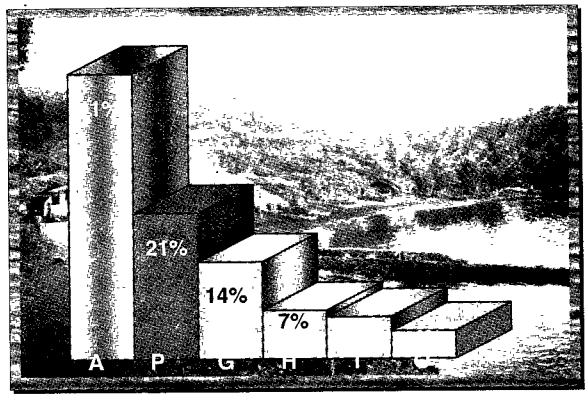

Gambar 6. Persentase Alasan Responden dalam Menentukan Pilihan Terhadap Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota Bitung (Periode 2005– 2010)

Mencermati beberapa alasan pokok responden dalam menetapkan pilihan mereka terhadap pasangan calon tertentu, seperti alasan memilih walikota dan wakil walikota harus baru dan mampu membawa perubahan merupakan alasan yang mendapat porsi terbesar (41%). Hal ini dapat dimaklumi, karena masyarakat lebih menyukai sesuatu yang baru atau katakanlah wajah baru dan cenderung mengharapkan suatu perubahan dari kondisi sekarang yang dianggap kurang membawa perubahan ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan wajah baru dan mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik adalah suatu alasan sekaligus harapan masyarakat Kota Bitung untuk lima tahun ke depan.

Komitmen keberpihakan kepada rakyat dan orang yang telah banyak berbuat untuk kepentingan rakyat merupakan alasan kedua dan ketiga yang mendapat porsi cukup besar (35%) dalam menetapkan pilihan pasangan calon walikota dan wakil walikota sekaligus menjadi impian yang senantiasa didambakan masyarakat Kota Bitung, karena selama ini, fakta menunjukkan bahwa silih bergantinya pemerintah, rakyat hanyalah merupakan sumber daya yang selalu dieksploitasi untuk kepentingan penguasa dan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Fenomena penggusuran dan pengusiran tampak di mana-mana, terutama di daerah perkotaan merupakan indikasi pembenaran fenomena tersebut. Pemukiman masyarakat (yang oleh penguasa dikatakan pemukiman kumuh), lokasi-lokasi pedagang kaki lima (PKL) yang notabene memberikan kontribusi PAD cukup besar kepada pemerintah kota, juga terkena penggusuran dan pengusiran dengan alasan mengganggu lalu-lintas dan merusak keindahan kota sehingga perlu ditertibkan. Dengan fenomena tersebut, masyarakat pemilih tentunya mendambakan pemimpin daerah (wali kota dan wakil wali kota) yang memilki komitmen keberpihakan dan telah banyak berbuat untuk kepentingan rakyatlah yang mereka tetapkan untuk dipilih menjadi kepala daerah untuk lima tahun ke depan, khususnya wali kota dan wakil wali kota Bitung.

Praktek Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah

1) Pengetahuan Masyarakat Tentang Konsep Politik Uang

Berdasarkan 208 responden yang diwawancarai dengan menggunakan kuesioner (Tabel 4) diketahui bahwa terdapat sekitar 171 responden atau ±82,2% di antara mereka mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan konsep politik uang, 21 responden atau ± 10,1% tidak tahu, sementara sekitar 7,7% tidak menjawab (abstain).

Tabel 4. Distribusi Jawaban Responden Tentang Tingkat Pengetahuan Mengenai Konsep Politik Uang dalam Pelaksanaan Pilwako Dirinci Per Kecamatan

Kategori Tingkat Pengetahuan	KECAMATAN BITUNG					Jumlah	
	Timur	Barat	Utara	Tengah	Selatan	(f)	(%)
Tahu (a)	27	31	20	52	41	171	82.2
Tidak tahu (b)	2	13	0	4	2	21	10.1
Abstain (c)	11	0	0	1	4	16	7.7
Jumlah	40	44	20	57	47	208	100

Dari 171 responden yang memahami konsep politik uang, lebih dari setengahnya (50,5%) memperoleh informasi melalui siaran televisi (15,9%) melalui surat kabar dan 4,8% melalui guru/dosen, dan sisanya melalui radio, teman/saudara, dan lainnya.

2) Tingkat Keberadaan Praktik Politik Uang dalam Pilwako Bitung

Permasalahan klasik dalam setiap pemilihan pemimpin, termasuk pemimpinan daerah (kepala daerah) adalah praktik politik uang sebagai salah satu strategi yang ditempuh oleh para calon/pasangan calon atau tim kampanye setiap pasangan calon untuk memenangkan pertarungan politik dengan cara menggunakan uang, baik sebagai komponen pembiayaan dalam kampanye, jasa para saksi, maupun pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti bantuan rumah ibadah, biaya pembuatan/perbaikan jalan lingkungan/pemukiman dan lain-lain, bahkan ada pasangan calon yang secara terang-terangan membagi-bagikan uang kepada masyarakat secara individu.

Gambaran tersebut, setidaknya berlaku pula pada proses pemilihan kepala daerah (pemilihan wali kota dan wakil wali kota) di Kota Bitung. Hal ini tergambar dari hasil penelitian sebagaimana dapat disimak melalui Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden Tentang Ada-Tidaknya Praktek Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pilwako

Kategori	KECAMATAN BITUNG					Jumlah	
	Timur	Barat	Utara	Tengah	Selatan	(f)	(%)
Ada (a)	19	30	0	14	21	84	40.4
Kadang-Kadang (b)	2	3	0	2	0	7	3.4
Tidak Ada (c)	6	10	20	41	26	103	49.5
Abstain	13	1	0	0	0	14	6.7
Jumlah	40	44	20	57	47	208	100

Distribusi data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 208 responden yang dimintai pendapatnya tentang ada-tidaknya praktik politik uang dalam proses Pilwako di Kota Bitung, ternyata hampir separuh dari mereka (49,5 %) menyatakan tidak ada praktik politik uang, sementara ± 40,4% yang menyatakan sebaliknya, yakni dalam proses pelaksanaan Pilwako di Kota Bitung ternyata terindikasi adanya praktik politik uang, sedangkan hanya 3,4% responden ragu-ragu dalam memberikan jawaban atas pernyatanyan tersebut, namun ada juga responden yang abstain (tidak menjawab), yakni ± 6,7%.

Dilihat dari sisi kewilayahan, ternyata 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Bitung Barat, Selatan, Timur dan Tengah cukup dominan dalam melakukan praktik politik uang, sementara Kecamatan Bitung Utara relatif bebas dari praktik politik uang.

Hasil penelitian ini terindikasi adanya praktik politik uang dalam proses pelaksanaan Pilwako di Kota Bitung walaupun hanya sekitar 40,4%. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku elite politik di daerah ini masih berorientasi pada pola pemikiran orde baru, bahkan lebih transparan lagi dalam menggunakan uang sebagai alat pencapaian tujuan politik yang sifatnya tentatif dan lebih bernuansa kepentingan pribadi dan golongan. Momentum kemiskinan dan keterbelakangan dalam pembangunan dimanfaatkan dengan tidak bertanggung jawab oleh para pasangan calon kepala daerah untuk meraih keuntungan peribadi dan golongan.

3) Pengaruh Praktik Politik Uang terhadap Perubahan Sikap Pemilih dalam Memilih Pasangan Calon

Distribusi data pada Tabel 6 menunjukkan rendahnya pengaruh praktik politik uang terhadap perubahan sikap pemilih dalam menetapkan pilihan mereka. Dari 208 responden yang diwawancarai, ternyata sekitar 45 responden atau 21,6% menyatakan ada pengaruh praktik politik uang terhadap sikap pilihan mereka, sementara sekitar 125 responden atau ± 60,1% berpendapat bahwa praktik politik uang tidak akan berpengaruh terhadap sikap pilihan mereka terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan. Selanjutnya hanya sekitar 15,4% tidak tahu atau ragu-ragu dalam mengemukakan pendapatnya, dan sisanya sebesar 2,9% tidak menjawab atau abstain.

Tabel 6. Distribusi Jawaban Responden tentang Ada-Tidaknya Pengaruh Politik Uang dalam Pelaksanaan Pilwako di Kota Bitung terhadap Perubahan Sikap Pemilih Dalam Menentukan Pilihan

Kategori Tingkat Pengaruh PPU	KECAMATAN BITUNG					Jumlah	
	Timur	Barat	Utara	Tengah	Selatan	(f)	(%)
IAda Pengaruh (a)	16	15	0	5	9	45	21.6
Ragu-ragu (b)	0	23	0	4	5	32	15.4
Tidak Ada Pengaruh (c)	19	6	20	47	33	125	60 1
Abstain	5	0	0	1	0	6	2.9
Jumlah	40	44	20	57	47	208	100

Realitas hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa responden sebagai pemilih jauh sebelumnya telah menetapkan pilihan terhadap pasangan calon tertentu dan hal ini sulit diubah walaupun ada praktik politik

uang. Artinya ada fenomena menarik di mana pemilih memiliki sikap konsistensi yang tinggi dalam menetapkan pilihan, walaupun diantara mereka ada yang kurang konsisten dalam menetapkan pilihan sebagai akibat dari praktek politik uang. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikut ini.

4) Derajat Konsistensi dan Inkonsistensi Pemilih dalam Menentukan Sikap Pilihan terhadap Calon Kepala Daerah atas Pengaruh Praktik Politik Uang

Hasil analisis data (Tabel 7) menunjukkan bahwa ±70% pemilih menyatakan tidak mengubah pilihan walaupun ada politik uang dalam arti bahwa pada awalnya mereka telah menetapkan pilihan terhadap pasangan calon tertentu sehingga tidak akan mengubah pilihan mereka pada hari pemungutan suara (hari H) walaupun mereka diberi uang atau material lainnya bahkan janji mendapatkan jabatan tertentu dari pasangan calon lain. Sedangkan 16% menyatakan tidak tahu atau ragu-ragu apakah nanti ada perubahan pilihan karena pengaruh politik uang, sementara sisanya sebesar ±11 % menyatakan kemungkinan besar ada perubahan pilihan dari pasangan calon yang telah mereka tetapkan sebelumnya untuk dialihkan kepada pasangan calon lain karena adanya pengaruh politik uang.

Tabel 7. Distribusi Jawaban Responden Menurut Derajat Konsistensi Antara Sikap dan Pilihan terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Dirinci Per Kecamatan (Periode 2005 – 2010)

Kategori	KECAMATAN BITUNG					Jumlah	
	Timur	Barat	Utara	Tengah	Selatan	(f)	(%)
Ada Perubahan Pilihan (a)	1	6	0	2	14	23	11.1
Ragu-ragu (b)	0	30	0	3	1	34	16.3
Tidak Ada Perubahan Pilihan (c)	33	8	20	52	32	145	69 7
Abstain	6	0	0	0	0	6	2.9
Jumlah	40	44	20	57	47	208	100

Realitas hasil penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7 mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Bitung memiliki komitmen yang kuat untuk membangun sikap konsistensi terhadap hati nurani mereka sendiri (satu, antara kata hati, ucapan dan perbuatan) akan kebenaran yang mereka yakini mampu membawa kemaslahatan masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian ini, setidaknya secara kasuistis membantah asumsi/teori ataupun pendapat yang menyatakan bahwa politik uang mampu mengubah sikap pemilih untuk mengalihkan pilihan mereka kepada pasangan calon lain yang menerapkan politik uang.

Kontribusi Partai Politik Terhadap Penentuan Sikap Pemilih dalam Memilih Pasangan Calon

Hasil analisis data menunjukkan bahwa perolehan penentuan sikap pemilih terhadap pasangan calon tententu turut dikontribusi oleh partai politik yang merupakan keanggotaan responden, baik sebagai pengurus, anggota maupun simpatisan partai politik yang bersangkutan.

Distribusi data hasil tabulasi menunjukkan bahwa tidak selamanya pasangan calon yang diusung oleh partai politik tertentu mendapat simpatik dari anggota atau pengurus partai yang bersangkutan. Artinya bahwa keanggotaan/ kepengurusan atau simpatisan terhadap partai politik tertentu tidak mutlak mendorong pemilih untuk memilih pasangan calon yang diusung oleh partai yang bersangkutan. Hal ini tentunya lebih dominan adalah karakteristik yang dimiliki oleh figur pasangan calon yang diusung partai politik apakah sesuai dengan keinginan dan alasan masyarakat pemilih untuk memilih pasangan calon yang bersangkutan.

Untuk memahami lebih jauh tentang sejauhmana kontribusi masing-masing partai politik terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang diusung oleh partai politik yang bersangkutan, dapat diamati melalui gambar berikut ini.

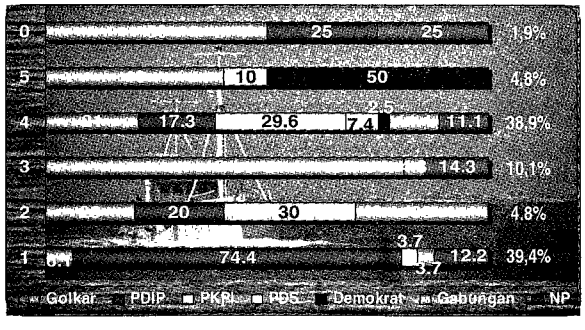

Gambar 7. Kontribusi Responden Sebagai Partisipan Partai Politik terhadap Penentuan Pilihan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung (Periode 2005–2010)

Distribusi data pada Gambar 7 mengindikasikan bahwa pasangan calon yang diusung PDIP (No. 1), ternyata memiliki

konstituen yang konsisten terhadap partainya. Hal ini dapat dilihat pada pasangan calon nomor 1 yang diusung PDIP, ternyata mendapat simpati terbesar dari konstituennya, yakni sekitar 74,4%, 12,2% dari responden non-partisan, seperti keluarga TNI-Polri, PNS dan sebagaian dari kalangan pelajar/mahasiswa. Namun dibandingkan dengan pasangan calon NU 4, ternyata pasangan calon NU 1 kurang bervariasi, di mana hanya komponen pemilih yang menetapkan pilihan mereka terhadap pasangan calon tersebut, sementara pasangan calon NU 4, memiliki konstituen yang cukup bervariasi, yakni sebanyak 7 komponen pemilih dengan kontribusi terbesar adalah PKPI, yakni sebesar ± 29,6%, menyusul Golkar (21%) dan PDIP (17,3%). Fenomena lain yang cukup menarik adalah pasangan calon dengan nomor urut 3 yang diusung oleh Partai Golkar, di mana kontribusi terbesar (± 81%) adalah pengurus, anggota dan simpatisan Partai Golkar itu sendiri. Hal ini merupakan realitas politik yang cukup membanggakan bagi partai Golkar, mengingat konsistensi kader Golkar dalam memilih calon yang diusung partai mereka sangat signifikan. Ini berarti pula bahwa Partai Golkar masih memiliki kader yang punya loyalitas tinggi terhadap partainya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil analisis data, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1) Dilihat dari sisi karakteristik responden yang berkaitan dengan beberapa aspek:
   a. Rata-rata usia di atas 40 tahun dengan berjenis kelamin laki-laki;
   b. Dari aspek agama, yang lebih dominan adalah Kristen Protestan yang terkonsentrasi di Kecamatan Bitung Selatan dan Bitung Timur, menyusul pemeluk agama Islam yang kebanyakan berdomisili di Kecamatan Bitung Barat dan Bitung Tengah.
   c. Sebagian besar pendidikan formal responden adalah tamatan SLTA dan kebanyakan berdomisili di Kecamatan Bitung Timur, sementara S1 hanya sebesar 5,8 persen yang kebanyakan berdomisili di Kecamatan Bitung Tengah dan Selatan.
   d. Jenis pekerjaan sebagian besar responden yang teridentifikasi adalah ibu rumah tangga, buruh, sopir, nelayan dan pegawai perusahaan.
   e. Responden didominasi oleh etnis Sanger yang kebanyakan berdomisili di Kecamatan Bitung Selatan, Tengah dan Bitung Timur; menyusul etnis Minahasa dan yang paling kecil adalah etnis Papua.
   f. Sebagian besar responden adalah mereka yang terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan partai politik, terutama PDIP, baik sebagai pengurus, anggota maupun simpatisan, menyusul Partai Golkar dan PKPI, sementara partai-partai yang berbasis keagamaan atau partai aliran kurang diminati masyarakat Kota Bitung.

2) Sikap responden pemilih dalam menentukan pilihan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung untuk periode 2005–2010 menyangkut:
   a. Hampir semua responden (pemilih) mengenal pasangan calon yang akan mereka pilih dengan baik dan memiliki tingkat keyakinan yang tinggi untuk memilih pasangan calon yang telah mereka kenal;
   b. Sementara itu, pasangan calon yang memperoleh tingkat kelayakan yang paling tinggi adalah pasangan calon nomor urut 4, menyusul NU 1, sedangkan pasangan NU 2, 3, dan 5, kebanyakan responden menjawab ragu-ragu atau tidak tahu.
   c. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa antara pasangan calon NU 1 dan 4 menduduki peringkat paling atas dalam perolehan simpati masyarakat pemilih, namun masih diungguli oleh pasangan NU 1 dengan selisih hanya sebesar ± 0,5 persen.
   d. Antara pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 4 memiliki basis massa yang cukup bervariasi dilihat dari sisi peta wilayah kekuatan, di mana pasangan calon NU 1 mendominasi di wilayah Kecamatan Bitung Tengah, sementara pasangan

calon NU 4 mendominasi di wilayah Kecamatan Bitung Timur, namun kedua pasangan calon tersebut bersaing ketat di wilayah Bitung Selatan dan Bitung Barat.

e. Respoden dalam menentukan sikap pilihan mereka terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung didasarkan pada beberapa alasan pokok, di antaranya (1) wali kota dan wakil wali kota terpilih adalah orang baru dan mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik; (2) Memiliki komitmen keberpihakan pada rakyat; (3) Telah berbuat banyak bagi kepentingan rakyat; (4) Memiliki pengalaman yang cukup dalam pemerintahan; (5) Mempunyai prioritas program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat; dan (6) Berlaku adil dan tidak diskriminatif.

f. Pasangan calon NU 1 yang diusung PDIP mendapat simpati (penetapan pilihan) dari responden yang memiliki latar belakang partai terbanyak, yakni PDIP sebesar 74,4 persen, Golkar 6,1 persen, PKPI dan partai gabungan, masing-masing 3,7 persen dan sisanya sebesar 12,2 persen dari responden yang non-partisan. Adapun pasangan calon NU 4 memperoleh simpati terbesar dari responden yang memiliki latar belakang PKPI sebesar 29,6 persen, Golkar 21 persen, PDIP 17,3 persen, partai gabungan dan non-partisan, masing-masing 11,1 persen, 7,4 persen dari PDS dan sisanya sebesar 2,5 persen dari Partai Demokrat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hanya responden (masyarakat) yang mempunyai latar belakang Partai PDIP yang konsisten terhadap pasangan calon yang diusung partai mereka, sementara responden dengan latar belakang politik lain tidak melihat partainya, tetapi karakteristik figur pasangan calon kepala daerah yang sesuai dengan kriteria yang mereka yakini mampu memimpin Kota Bitung untuk lima tahun ke depan.

3) Ada indikasi kuat terdapat praktik politik uang dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Wali Kota dan Wakil Wali Kota) Bitung periode 2005–2010. Sebagian besar responden (masyarakat Kota Bitung) mengetahui pengertian politik uang melalui media siaran televisi, surat kabar, radio siaran, dan dari orang-perorang (teman, saudara, dosen, dan lain-lain).

4) Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa praktik politik uang kurang efektif dalam mempengaruhi sikap responden (masyarakat) dalam mengubah pilihan mereka terhadap pasangan calon lain (yang mempraktikkan politik uang tersebut) dari pilihan semula. Artinya, sebagian besar responden (masyarakat) tetap konsisten dengan sikap pilihan terhadap pasangan calon yang telah mereka tetapkan sebelumnya.

Rekomendasi

Mengacu pada beberapa temuan dalam penelitian ini dan perkembangan baru dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Wali Kota dan Wakil Wali Kota) Bitung, maka perlu diberikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh semua pemangku kepentingan, antara lain:

a. Untuk meminimalkan praktik politik uang dan jenis pelanggaran lainnya, maka Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Kota Bitung perlu mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara konsisten dan tegas tanpa pandang bulu, dengan cara memberikan sanksi kepada kontestan yang melakukan praktik politik uang, termasuk pelanggaran lainnya sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Untuk menghindari perbedaan perolehan jumlah suara antarkontestan (pasangan calon) dalam pemilihan kepala daerah, maka setiap TPS ditempatkan 1 (satu) orang anggota panitia pengawas (Panwas) kecamatan yang berfungsi mengawasi dan memonitor hasil pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS, sementara di tingkat kecamatan yang dianggap paling rawan dalam memanipulasi jumlah suara,

maka perlu pula ditempatkan 1 (satu) orang anggota Panwasda (kota) untuk mengawasi dan memonitor rekapitulasi suara dari masing-masing TPS.

c. Tidaklah berlebihan apabila hasil penelitian ini dijadikan bahan perbandingan sekaligus pertimbangan bagi KPUD Kota Bitung dalam menyelesaikan permasalahan selisih/ perbedaan perolehan jumlah suara menurut versi masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang sekarang mengemuka sebagai akibat dari adanya indikasi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh tim kampanye masing-masing pasangan calon.

Daftar Pustaka

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI, No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti UU No.22 tahun 1999.

Azwar, Saifuddin. 1997. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Liberty.

Effendi, O. U. 1988. *Psikologi Komunikasi.* Bandung: Tarsito.

Gerungan, W. A. 1996. *Psikologi Sosial.* Bandung: Eresco.

Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.* Jakarta: PT Gramedia

Manulang, M. 1983. *Manajemen Personalia.* Bandung: Alumni.

Mueller, Daniel. 1992. *Mengukur Sikap Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Lolita Krisnawati (Ed.). 2003. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah.* Jakarta: Galia Indonesia.

Sarwono, S. W. 1984. *Teori-Teori Psikologi Sosial.* Jakarta: Rajawali.

Stoner, L. J, dan C. Wankel. 1989. *Manajemen,* diterjemahkan oleh Bakowatun Wilhemus. Jakarta: Intermedia.

Westerman dan Donoghue. 1992. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.